BAB II

RUANG LINGKUP PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Instansi

Sejarah Dinas Bina Marga dimulai dengan dibuatnya Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Ditetapkan Berdasarkan Perda No.11 Tahun 1980, SK Walikotamadya No.224/83 tanggal 2 September 1983, No. 053/90 tanggal 20 januari 1990 dan No.054/1993 tanggal 1 Februari 1993 Tentang Susunan Organisasi dan UPTD Pemeliharaan Jalan.

Dengan Menimbang Peraturan Daerah Kota Bandung, Nomor : 05 Tahun 2001. Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berasaskan desentralisasi. Dipandang perlu menata kembali struktur organisasi Perangkat Daerah. Bahwa sehubung dengan maksud tersebut maka struktur organisasi Perangkat Daerah perlu di tata kembali dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dengan Mengingat Peraturan Daerah Kota Bandung, Nomor : 05 Tahun 2001. tentang Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan tentang Pembentukan Wilayah/Daerah), dan Undang –Undang Nomor 08 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041 jo. Lembaran Negara Tahun 1965, Tambahan Lembanga Negara Nomor 3890, dan Undang –undang Nomor 22

Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839), dan undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) dan Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembara Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851), dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358), dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Tahun 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 165), Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1999 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, dan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan dan pengundangan Peraturan Daerah Kota Bandung, dan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000-2004, dan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Derah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom.

Dengan adanya perubahan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum menjadi Dinas Bina Marga maka kebijakan Tahun 2000 disesuaikan dengan tugas pokok dan wewenang Dinas Bina Marga khusus dibidang kebinamargaan.

2.2 Tempat dan Kedudukan Instansi

Tempat Kerja Praktek di Lingkungan Dinas Bina Marga Kota Bandung, pada Seksi Leger Jalan yang bertempat di Jalan Wastukencana No 2 Bandung.

2.3 Bentuk dan Badan Hukum Instansi

Bentuk dan badan Hukum dengan Mengingat Nomor 327 Tahun 2001 tentang Undang –undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok – pokok kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999, dan Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang – undang Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Undang – undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelengara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas wilayah kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kebupaten Daerah Tingkat II Bandung, dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom, dan peraturan pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi perangkat Daerah, dan Peraturan Daerah Kota Bandung Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Sebagai Daerah Otonom,

dan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung, dan peraturan Daerah kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Propeda.

Dengan memperhatikan :

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2001 Tentang Persetujuan Terhadap Rincian Tugas Pokok dan Fungsi serta uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

2.4 Bidang Pekerjaan Instansi

Bidang pekerjaan pada Dinas Bina Marga adalah sebagai berikut :

1. Pemeliharaan Jalan.
2. Pemeliharaan Jembatan.
3. Pemeliharaan Saluran.
4. Pemeliharaan Berm.
5. Pemeliharaan Trottoar.

2.5 Bidang Pekerjaan Divisi / Departemen Tempat Kerja Praktek

Tempat kerja Paktek dibagian Seksi Leger.

1. Seksi Leger Jalan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagai tugas Sub Dinas Pengendalian Operasional Dalam Mengelolah Leger Jalan.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Leger Jalan mempunyai fungsi :

2.1. Pelaksanaan pengaturan administrasi dokumentasi leger jalan.

2.2. Pelaksanaan pemeliharaan, pelayanan informasi mengenai leger jalan.

2.3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas – tugas yang berkaitan leger jalan.

2.6. Struktur Organisasi Perusahaan

(Terlampir)


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM